

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Menurut Mariun (1979) (dalam Yuliantini: 2012) dengan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar. Agar pemerintah daerah dapat mengurus daerahnya dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2004:94).
2. Dana perimbangan
3. Pendapatan lain-lain yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh kabupaten/kota tersebut untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah juga merupakan salah satu tolak ukur sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya.

Salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah yang dioptimalkan pengelolaannya adalah penerimaan dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Jika pengelolaan pemasukan dari pajak daerah ini dapat dioptimalkan maka dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah yang diperoleh pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Berikut ini adalah tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) eks-karesidenan Surakarta:

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota**  
**Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2014-2015**

| Kabupaten/<br>Kota | Tahun              |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | 2014               | 2015               |
| Surakarta          | 335.660.206.640,82 | 372.798.426.790,07 |
| Karanganyar        | 215.298.860.199,00 | 255.445.549.750,00 |
| Sukoharjo          | 264.814.413.083,00 | 313.947.492.011,00 |
| Boyolali           | 227.516.495.964,00 | 260.633.637.928,00 |
| Sragen             | 254.392.449.817,00 | 267.711.820.479,00 |
| Klaten             | 177.922.415.860,00 | 190.622.670.128,45 |
| Wonogiri           | 182.149.063.108,00 | 211.208.601.200,00 |

Sumber: BPK, 2015 (data diolah)

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Reza Arditia (2012) tentang Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, menyimpulkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selama periode tahun 2007-2011 adalah sebesar 60,42%. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah rata-rata dari selama periode tahun 2007-2011 adalah sebesar 93,46% berdasarkan kriteria efektivitas diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Surabaya dinilai efektif dalam mengelola pajak daerah.

Menurut penelitian Irlan dan Zely (2013) tentang Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata dari tahun 2005-2010 adalah sebesar 12,84%. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya penerimaan di sektor pajak daerah dibandingkan dengan sektor lainnya yang diakibatkan karena belum

maksimalnya komponen/unsur-unsur pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Musi Banyuasin.

Menurut penelitian Bobby Rantow (2014) tentang Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo, menyatakan bahwa selama periode 2007-2012 hanya empat jenis pajak daerah yang berkontribusi positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo. Keempat jenis pajak tersebut adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Sementara pajak restoran dan pajak galian C justru memberikan pengaruh yang negatif terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo. Sedangkan pajak parkir, meskipun memberikan pengaruh positif namun pengaruhnya tidak signifikan.

Menurut penelitian Irsandy, Nengah dan Devi (2014) tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013), menyatakan bahwa pada tahun 2010 memiliki efektivitas terendah (69,30%) dan pada tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas tertinggi (136,67%). Sedangkan pada tahun 2009 memiliki kontribusi terkecil (45,21%) dan pada tahun 2012 memiliki kontribusi terbesar (72,66%).

Menurut penelitian I Gede Oka dan Ni Made Adi (2015) tentang Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah, menyatakan bahwa rasio efektivitas Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam penerimaan pajak daerah tergolong dalam kategori sangat efektif. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak daerah pada pendapatan asli

daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung selama periode 2009-2013 selalu berfluktuasi dan rata-rata tingkat kontribusi pajak Daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung selama lima tahun terakhir tergolong dalam kategori sangat baik.

Menurut Darmuki dan Sri Yunawati (2016) tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau, menyatakan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah yang ada di Provinsi Riau dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sangat efektif dengan rata-rata presentase sebesar 114%. Dan kontribusi yang diberikan pajak daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terhadap pendapatan asli daerah adalah sangat baik dengan rata-rata peresentase sebesar 81%.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah eks-karesidenan Surakarta, maka peneliti mengambil judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Eks-Karesidenan Surakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan dari latar belakang di atas, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni memberikan informasi mengenai tingkat efektivitas dan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada eks-karesidenan Surakarta pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masing-masing pemegang kebijakan terutama pemerintah daerah.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disajikan dengan sistematika penulisan untuk memperoleh gambaran yang singkat dari skripsi ini yang terdiri dari lima bab.

Adapun pembahasan penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisi tentang gambaran mengenai isi dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSAKA. Bab ini berisi tentang konsep dan teori yang melandasi penelitian ini yang mencakup landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN. Bab ini membahas mengenai data yang digunakan, serta pembahasan atau hasil analisis data.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan nantinya dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.